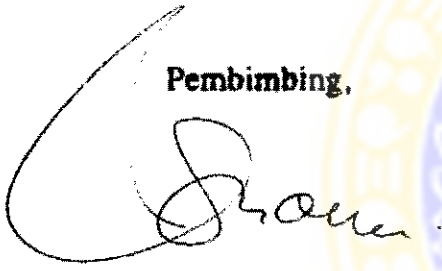


**AKIBAT HUKUM MERGER PERBANKAN
TERHADAP NASABAH DAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Pembimbing,



Dr. Moch. Isnaeni, S.H. MS.

NIP. 130 604 270

Penyusun,



Diah Sukma Permata Riani

NIM. 039414052

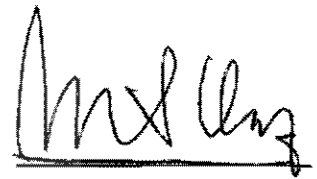
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

1998

Telah diuji di hadapan Panitia Penguji pada tanggal : 30 Juli 1998.

Panitia Penguji Skripsi :

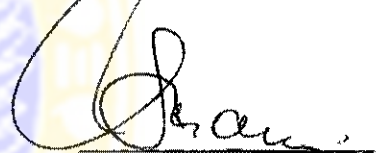
1. Ketua : Hj. Moerdiati, S.H., MS.



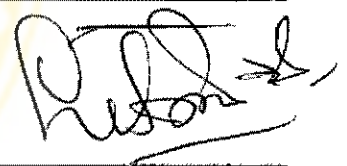
2. Sekretaris: Sri Handajani, S.H., M.Hum.



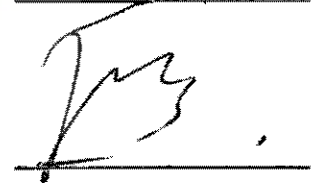
3. Anggota : 1. Dr. Moh. Isnaeni, S.H., MS.



2. Lisman, S.H., MS.



3. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan merger dalam praktek perbankan, terdiri dari empat tahap yaitu tahap persiapan, tahap lanjutan, rapat umum pemegang saham dan pelaksana, dan terakhir adalah tahap pelaksanaan akhir.

Pada saat merger dilaksanakan bila merger tersebut tanpa didahului dengan likuidasi maka dengan sendirinya aktiva, pasiva, dan pemegang saham dari bank yang akan merger akan menggabungkan diri dengan bank penerima merger; bagi pemegang saham dari bank yang akan merger bila ia menyetujui dilaksanakannya merger maka ia akan mendapat kompensasi berupa saham dalam bank hasil merger, dan bagi pemegang saham yang tidak menyetujui terlaksananya merger dapat menjual sahamnya dengan harga yang wajar; sedangkan bagi nasabah pada saat terjadinya merger maka hubungan hukum antara nasabah dengan bank yang akan merger beralih kepada bank hasil merger. masih terdapat ketidakjelasan tentang hubungan hukum antara bank yang akan merger dengan nasabah

Untuk melindungi nasabah dari akibat hukum merger yang merugikan karena sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan di bidang perbankan yang mengatur tentang hal ini.

- b. Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam hal pemegang saham minoritas tidak menyetujui karena pelaksanaan merger dapat merugikan kepentingannya. Dapat dilakukan sebelum merger maupun sesudah merger, sebelum merger perlindungan bagi pemegang saham minoritas melalui keterbukaan dari bank yang akan merger terutama keterbukaan informasi. Perlindungan sesudah merger dilaksanakan tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tapi bagi bank-bank yang berbentuk perseroan terbatas perlindungan terhadap pemegang saham secara umum diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1995.

2. Saran

- a. Untuk melindungi nasabah terhadap akibat-akibat dari merger perbankan yang merugikan dapat dilakukan jika ada suatu pengaturan hukum tentang nasabah, hak dan kewajibannya; dan dimasukkannya klausul-klausul dalam perjanjian antara bank dan nasabah yang intinya melindungi nasabah dari semua kegiatan yang memberikan akibat bagi nasabah termasuk didalamnya adalah merger.

- b. Dalam pelaksanaan merger antar bank perlu diperhatikan kepentingan dari para pemegang saham terutama pemegang saham minoritas, dalam hal ini hendaknya pihak bank yang akan merger bersikap terbuka pada seluruh pemegang saham, agar pemegang saham dapat mengetahui dengan jelas bahwa merger yang akan dilaksanakan tersebut benar-benar dapat memberi keuntungan baik bagi bank itu dan bagi pemegang saham itu sendiri. Selain itu agar ada kejelasan tentang perlindungan bagi pemegang saham minoritas diharapkan adanya suatu pengaturan hukum tentang pemegang saham, agar dalam pelaksanaannya merger tidak merugikan pemegang saham minoritas.